

# REAKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MORAL BANGSA INDONESIA

Oleh: Farida Sekti Pahlevi\*

**Abstract:** *Education plays an important role in the lives of individuals and communities, and can not be separated from public life. Educational needs of the community is increasingly rising, according to the times. Education is closely related to the values that exist in society and culture. So simple, however civilization of a society, in which the progress of an educational process. Moral degradation can occur because of a nation loses its identity. They can not defend what the credentials for this. They are complacent and are less able to filter out the culture in Indonesia. But in fact, these people have Pancasila. Pancasila is now beginning to fade characteristics of consciousness to experience it. Starting from the first to the fifth, all including various lines of human life lived. Therefore, we must consider the need to reaffirm the national identity, ideology. Deepening the values of Pancasila done through activities or experiences of concrete, so that the values of Pancasila embedded and terhayati in life. The moral quality of a nation must always be maintained and enhanced in accordance with the personality of the nation, as well as the people of Indonesia should maintain and improve its quality. The realization of the Indonesian nation that has quality is reflected by the good and bad things done by the people of Indonesia. In line with the goals of education includes an overview of the values of good, great, fast, true, and beautiful for life so when you want to become a quality they should pay more attention to moral education both through formal, informal and non-formal based on the values of Pancasila.*

**Keywords:** *Education, Pancasila, moral, nation*

## PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia mengalami suatu perubahan dan perkembangan yang sangat besar terutama berkaitan dengan kondisi pendidikan moral Pancasila yang tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Di era reformasi dan globalisasi ini kondisi Pancasila seakan-akan “hilang dari peredaran” dan bahkan hanya cenderung dijadikan pajangan semata. Padahal Pancasila sesungguhnya tidak hanya merupakan ideologi bangsa Indonesia tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar NKRI dan tujuan bangsa Indonesia.

---

\* Dosen Tetap Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Eksistensi sebuah bangsa dapat diukur dari sejauh mana bangsa itu mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan peradaban dunia. Peradaban yang maju adalah produk dari bangsa yang maju, yang didalamnya terdapat masyarakat yang memiliki pola pikir dan perilaku yang maju pula. Setiap bangsa pasti memiliki adat istiadat, kebudayaan, bahasa, serta sistem kepercayaan yang berbeda-beda antar satu dan lainnya. Meskipun berbeda, nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi setiap bangsa pada umumnya adalah nilai-nilai yang hampir sama, yaitu sebuah nilai luhur yang berimplikasi positif bagi kemajuan umat manusia. Tak ada satupun bangsa didunia ini yang berpedoman pada sebuah nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (nilai Universal).

Sebuah bangsa bisa disebut sebagai bangsa yang maju dan kuat apabila nilai-nilai dasar yang menjadi pedomannya benar-benar termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan berbangsa tidak ada lagi perilaku penyimpangan, penyelewengan, penjajahan, diskriminasi dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Namun, dewasa ini bangsa Indonesia seolah sedang berada pada posisi yang sangat rapuh. Berbagai permasalahan kian menjamur mengotori bangsa ini. Hampir disetiap lini dan sektor kehidupan tidak luput dari permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan.

Kondisi kerapuhan bangsa ini harus segera dicarikan solusi dan dihentikan. Oleh karenanya, diperlukan upaya serius untuk mengembalikan etika dan moral bangsa agar bisa kembali pada nilai-nilai yang luhur. Dan untuk itu, diperlukan sebuah patokan nilai yang bisa diterima oleh seluruh elemen bangsa yang majemuk ini. Sebuah nilai yang tidak bias dan ambigu, melainkan nilai yang mampu mengakomodir seluruh ide-ide masyarakat. Mengembalikan moral dan etika ditengah-tengah kondisi bangsa mejemuk yang sudah rapuh memang bukan perkara mudah. Butuh perjuangan keras untuk mewujudkannya, dan pendidikan Pancasila mulai direaktualisasikanlah yang paling tepat untuk kondisi saat ini. Batasan tentang pendidikan seperti sifat sarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu maka tidak sebuah batasanpun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beranekaragam, dan kandungannya berbeda satu dari yang lainnya.<sup>1</sup>

Batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya adalah (a) Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan

---

<sup>1</sup> Umar Tirtaraharja dan Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 33-35.

sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain; (b) Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik; (c) Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik; (d) Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja.

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan, baik individu maupun masyarakat, dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pendidikan dari masyarakat semakin hari semakin meningkat, sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan erat kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Jadi bagaimanapun sederhananya peradapan suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung suatu proses pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pengertian pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin yang setinggi-tingginya.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa: (1) pendidikan adalah aktivitas manusia; (2) untuk memberikan tuntunan, bimbingan, pengajaran, dan latihan; 3) dilakukan dengan sengaja, teratur, dan berencana; 4) perjanjian mengubah tingkah laku anak didik ke arah kedewasaan.

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu serta menggunakan alat tertentu.<sup>2</sup>

John F Kennedy mengatakan, “ Bila ada sesuatu yang salah pada sistem disuatu Negara, maka lihatlah apa yang salah pada pendidikannya.” Mengingat maju atau mundurnya suatu bangsa salah satu faktor utamanya adalah pada pendidikannya, maka seberapa besar

---

<sup>2</sup> Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan*, 37.

peran sentral dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkarakter akan ikut menjadi determinan dalam memajukan suatu bangsa. Dan disinilah dunia pendidikan sangat memegang peranan yang strategis. Tentunya dengan cara mengaktualisasi implementasi dari Pancasila dalam berbagai basis pendidikan yang ada agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pengajarannya.

## **KEDUDUKAN PANCASILA**

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “*Panca*” yang beraati lima dan “*sila*” yang berarti aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* yang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik dalam didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap

---

<sup>3</sup> Tobroni dkk, *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme* (Malang: Pusapom, 2007), 8.

<sup>4</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 52.

warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.<sup>5</sup>

Kontruksi UUD 1945 secara eksplisit tidak menjelaskan tentang Pancasila. Namun, secara implisit sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat berbunyi “ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila secara sah diakui oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai dasar dalam mencapai tujuan negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang disepakati sejak bangsa Indonesia memproklamkan diri sebagai negara merdeka baik politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

#### 1. Nilai Ketuhanan

Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan Kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

#### 2. Nilai kemanusiaan

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akanbisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk TuhanYang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, mak akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan

---

<sup>5</sup> Kansil dan Christin S.T Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 21.

santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

### 3. Nilai Persatuan

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

### 4. Nilai Kerakyatan

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

### 5. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Negara Indonesia dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara ini dilandasi oleh filsafat atau ideologi pancasila. Fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideologi berarti mengubah eksistensi dan sifat negara. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang kepada dasar negaranya. Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut di atas, sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan: “....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagai suatu pedoman untuk diwujudkan dalam perilaku sehari-hari maka ideologi dalam berbagai gerak aktifitasnya cenderung berupaya secara sistematis untuk menanamkan keyakinan pada para pendukungnya untuk menyamakan aksi, gerak, dan tingkah laku yang sejalan dengan garis ideologi yang sedang dikembangkan.<sup>6</sup> Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamen atau pondasi dari bangunan negara. Kuatnya fundamen negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamen suatu negara, berakibat lemahnya negara tersebut. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (filosofische grondslag dari negara), Staats fundamentele norm, weltanschauung dan juga diartikan sebagai ideologi negara (staatsidee).

Pancasila terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem falsafah. Yang dimaksud sistem disini adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Suatu kesatuan bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan, saling ketergantungan
4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks

Pancasila yang terdiri dari bagian-bagian sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1. Negara berkedaulatan rakyat (= negara demokrasi: sila IV).
2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III), ditegakkan sebagai NKRI.
3. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat): asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai negara hukum Pancasila.

---

<sup>6</sup> Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Pres, 2011), 1.

<sup>7</sup> Kaelan, *Pendidikan keawarganegaraan* (Jogjakarta: Universitas Gajahmada, 2010), 9.

4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI; ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.
5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan: sila III-IV-V); ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila.<sup>8</sup>

Pancasila sebagai ideologi bangsa lahir melalui proses yang panjang dengan bersendikan keberagaman dalam kebhinnekaan dan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka, open ideology, living ideology dan bukan merupakan suatu dogma statis yang menakutkan (Yudhoyono, 2006). Pancasila sebagai falsafah kenegaraan dapat diterjemahkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platform di antara sesama warga masyarakat dalam menyepakati secara konstitusionalisme bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka di dalam \ konteks kehidupan bernegara.

## REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan Tujuan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat Jasmani dan Rokhani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Moerdiono menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang

---

<sup>8</sup> M Noor Syam, *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)*, edisi II, (Malang: Laboratorium Pancasila. 2000), 3.

<sup>9</sup> UU No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional

mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi

suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut.<sup>10</sup>

Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum-universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.<sup>11</sup>

Aktualisasi Pancasila harus mulai digaungkan mulai dari berbagai lingkungan pendidikan. Baik itu di keluarga sebagai pendidikan informal, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, maupun dalam masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal. Kesemua ranah pendidikan tersebut harus melekat dengan nilai- nilai Pancasila.

Kita harus bersyukur apabila dalam kondisi saat ini mulai merindukan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sesuatu hal yng masih baik, tepat, relevan dan menjadi jati diri serta konsensus-konsensus dasar harus terus dilanjutkan. Sementara sesuatu hal yang tidak sesuai dan tidak tepat lagi digunakan maka harus ada pembaharuan. Sesungguhnya Pancasila apabila dipahami, dihayati dan diamalkan secara jujur dan benar serta konsekuaen oleh setiap anggota masyarakat, utamanya para penyelenggara negara dean para elit politik dalam melaksanakan gerakan reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas maka Pancasila hendaknya dapat menjadi perekatdan mengarahkan pendidikan yang ada di Indonesia ini semakin ditingkatkan. Secara filosofis Pancasila dapat dikembangkan menjadisistem moral universal, yang dipayungi oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa,sebagai sumber nilai utama dan tertinggi dari sila-sila yang lain dan kemudian diakhiri dengan sila kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagai tujuan kemerdekaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moerdino, *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas*, dalam Majalah *Mimbar* No.75 tahun XIII. 1995,15.

<sup>11</sup> Suwarno, P.J, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1993), 108.

<sup>12</sup> Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila*,10.

Pancasila tidak hanya mengandung nilai budaya bangsa Indonesia akan tetapi juga merupakan sumber hukum dasar nasional dan merupakan perwujudan cita-cita luhur Bangsa Indonesia diberbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya juga harus dijabarkan menjadi norma moral, norma pembangunan, norma hukum, dan etika berkehidupan berbangsa. Dengan demikian sesungguhnya secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi perwujudan cita-cita bangsa. Permasalahan yang datang adalah pada saat bagaimana mengaktualisasikan Pancasila kedalam kehidupan nyata setiap pribadi warga negara Indonesia, sehingga bangsa ini tidak akan merasa kehilangan norma moral sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengatasi permasalahan krisis multi dimensi termasuk krisismoralyang sedang melanda bangsa Indonesia untuk menjangkau masadepan yangdicita-citakan.

Apabila bangsa Indonesia tidak dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila maka Indonesia akan terkubur dengan ideologi transnasional (kapitalisme) yang memang dirancang untuk diberlakukan sebagai satu-satunya nilai yang akan menyatukan umat manusia. Kapitalismesecara operasional berwujuddemokratisasi, HAM, dan pasar bebas yang bersandar pada individualismeyang sekarang banyak dipujasebagai sistem yang terbaik di dunia.

Melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah merupakan suatu imperatif yuridis dan imperatif politis. Dalam kehidupan kenegaraan, Pancasila adalah dasar filsafat negara baik yuridis maupun politis. Agar nilai-nilai Pancasila tidak mengalami kepunahan oleh pengaruh globalisasi yang semakin dahsyat, maka agar reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tidak dapat ditunda-tunda lagi.<sup>13</sup>

Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Soedjati Djiwandono mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat “sakral” dan taboo berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun

---

<sup>13</sup> Kaelan, *Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar filsafat dan ideologi Bangsa dan negara Indonesia* (Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006), 8.

mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.<sup>14</sup>

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses ke-menjadi-an yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila.

Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-1, ke-2, dan ke-5

---

<sup>14</sup> Soedjati Djiwandono, J., *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan*. Jakarta: CSIS, 1995), .2-3.

yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis.<sup>15</sup>

## **PENTINGNYA PENDIDIKAN MORAL**

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat. Ada tiga jenis pendidikan yaitu;

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh dan dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan. Kedudukannya setara dengan pendidikan formal dan nonformal. Hal paling khas yang menjadi nilai lebih pendidikan informal dibandingkan model pendidikan lainnya adalah, kemungkinan yang lebih besar akan tergalai dan terkelolanya potensi setiap anak secara maksimal.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan informal tidak hanya berwujud fisik yang terbatas pada ruang dan waktu saja tetapi merupakan sistem pendidikan tanpa bentuk dan tanpa akhir. Kapan saja, dimana saja, pendidikan informal bisa dijalankan.<sup>16</sup>

Di dalam Lingkungan keluarga (pendidikan informal) anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Keyakinan-keyakinan yang bersifat religius ditanamkan pada pendidikan informal. Kebiasaan baik dan keyakinan-keyakinan penting yang mendarah daging merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk pembangunan.<sup>17</sup>

Peran keluarga dalam pendidikan nilai adalah mendukung terjadinya proses identifikasi, internalisasi, panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga. Lingkungan keluarga dengan demikian menjadi lahan paling subur untuk menumbuh kembangkan pendidikan moral.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Suwarno, P.J., *Pancasila Budaya Bangsa*, 126.

<sup>16</sup> Likumahua, *Sastra Suatu Sarana Pendidikan Informal* (Salatiga: Widya Sari Press Salatiga, 2001), V.

<sup>17</sup> Umar Tirtaraharja dan Sulo, *Pengantar Pendidikan*, 305-306.

<sup>18</sup> Elly Retnaningrum dalam ([http://educare.e-fkipunla.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=12&Itemid=18](http://educare.e-fkipunla.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18), di akses tanggal 4 Maret 2010).

Pendidikan Formal merupakan pendidikan yang diperoleh melalui sekolah dimana kegiatan belajar mengajarnya secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan formal memiliki kedudukan sangat menonjol di dalam sistem pendidikan kita, karena sekolah yang makin lama makin berkembang.

Pendidikan Non Formal merupakan pendidikan di luar sekolah yang secara potensial dapat membantu pendidikan formal dalam aspek-aspek tertentu. Yang dimaksud pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur, dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pendidikan non formal merupakan suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja dan sistematis tetapi tidak terlalu ketat. Jadi pendidikan non formal dapat disesuaikan waktu pelaksanaannya, materi yang diberikan, proses belajar mengajar yang dipakai serta fasilitas yang digunakan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan non formal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Magnis-Suseno (dalam Budiningsih, 2004:24) dikatakan bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya manusia. Sikap moral disebut dengan moralitas, jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.<sup>19</sup>

Menurut Lillie, kata moral berasal dari kata *mores* (bahasa latin) yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat.<sup>20</sup> Sedangkan menurut definisi lain mengatakan bahwa moral adalah sesuatu yang berkaitan, atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salahnya sesuatu tingkah laku. Selain itu moral juga diartikan, adanya kesesuaian dengan ukuran baik buruknya suatu tingkah laku atau karakter yang telah diterima oleh sesuatu masyarakat, termasuk didalamnya pelbagai tingkah laku spesifik, seperti misalnya tingkah laku seksual. Sehingga dapat dipahami bahwa istilah moral pada hakikatnya menunjuk kepada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh sesuatu komunitas.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Dalam Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral: Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 24.

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> Cheppy Haricahyono, *Dimensi- Dimensi Pendidikan Moral*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 221.

Nilai moral merupakan nilai yang penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk Tuhan, maupun makhluk sosial. Nilai moral merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar, tuntunan, dan tujuan manusia dalam kehidupannya.<sup>22</sup>

Nilai moral adalah sesuatu perbuatan yang didalamnya mengandung hal yang bermakna atau bisa dikatakan berharga. Di dalam menanamkan pendidikan nilai moral maka harus diperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral, yaitu (1) Pengertian atau pemahaman moral, yaitu kesadaran moral, rasionalitas moral atau alasan mengapa seseorang harus melakukan hal itu, suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral; (2) Perasaan moral, lebih pada kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik. Perasaan mencintai kebaikan dan sikap ehati terhadap orang lain merupakan ekspresi dari perasaan moral; (3) Tindakan moral, yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan-tindakan moral ini perlu difasilitasi agar muncul dan berkembang dalam pergaulan sehari-hari.

Dijadikannya pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok dalam berpikir dan berbuat, dan hal ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu kedalam sikap dan perilaku nyata baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai luhur Pancasila adalah media yang tepat untuk merealisasikan hal tersebut, dengan tindakan yang tepat maka akan dihasilkan pula *output* atau keluaran yang tepat yaitu bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Tanpa adanya realisasi atau perwujudan nyata nilai-nilai luhur tersebut, maka Pancasila hanya tinggal ucapan-ucapan tanpa makna.

Moral atau dalam kata lain disebut kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Jadi pendidikan moral ditujukan untuk memagari manusia dari melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kurun satu dekade ini, bangsa Indonesia mengalami kemunduran moral yang sangat hebat, ditandai dengan tingginya angka *freesex* atau seks bebas di kalangan remaja, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang, seringnya terjadi bentrokan antar warga, antar pelajar, mahasiswa dengan aparat, dan

---

<sup>22</sup>Erlin Slamet dalam (<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-indonesia/article/view/23> SKRIPSI Jurusan Sastra Indonesia-Fakultas Sastra UM, 2006, di akses tanggal 4 Maret 2010)

lainnya yang biasanya didasari hal-hal sepele, semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke permukaan juga menunjukkan degradasi moral tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga terjadi pada para pejabat yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan bagi warganya.

Kebudayaan akan mempengaruhi cepat lambatnya pencapaian tahap-tahap perkembangan moral dan juga mempengaruhi batas tahap perkembangan yang dicapai. Dengan kata lain, bahwa individu yang mempunyai latar budaya tertentu dapat berbeda perkembangan moralnya dengan individu lain yang berasal dari kebudayaan lain atau perkembangan moral dipengaruhi oleh faktor kebudayaan.<sup>23</sup>

Perpaduan atau kombinasi antara pendidikan moral dan pendidikan karakter yang berbasiskan nilai-nilai luhur Pancasila saat ini akan membawa pengaruh positif terhadap pembentukan karakter dan moral generasi muda bangsa Indonesia. Negara Indonesia dengan berbagai macam masalah yang mendera di dalamnya ibarat sebuah “piring yang sudah kotor”, yang apabila piring itu digunakan tanpa dibersihkan terlebih dahulu maka akan mengotori tangan pengguna berikutnya. Jadi diperlukan adanya *treatment* atau perlakuan khusus pada generasi muda sebagai calon penerus pemerintahan, pemegang tongkat estafet kekuasaan dan pengelola negara agar mereka tidak turut melakukan hal-hal negatif yang justru akan menimbulkan derita dan krisis berkepanjangan bagi rakyat Indonesia. Perlakuan khusus tersebut berupa penanaman dan peningkatan pemahaman mereka terhadap Pancasila dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Pembinaan generasi muda sejak dini dengan cara memperkenalkan mereka terhadap ideologi Pancasila dan pengaplikasiannya secara nyata merupakan hal mendesak yang harus segera dilaksanakan. Diperlukan andil pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam proses pelaksanaannya. Pendalaman nilai-nilai moral dilakukan melalui kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman konkret, sehingga nilai-nilai moral tertanam dan terhayati dalam kehidupan. Namun apabila pelaksanaannya dilakukan sekali atau dua kali saja maka akan memperoleh hasil yang kurang optimal. Secara umum pendidikan moral dan pendidikan nilai dapat dibedakan dengan pendidikan nilai seringkali dipahami sebagai upaya mengajarkan nilai-nilai sosial, politik, religius, estetika, atau tipe-tipe nilai lainnya. Sedangkan pendidikan moral umumnya lebih menunjuk kepada

---

<sup>23</sup> Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral: Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 8.

pengembangan konsepsi keadilan yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran.

Pancasila harus dikembangkan dengan melalui kajian ilmiah di dunia pendidikan di Indonesia. Kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil, namun juga mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai filosofis bangsa sebagai local wisdom sekaligus sebagai ciri khas dan identitas bangsa.

lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila dari dalam jiwa bangsa Indonesia menimbulkan dampak negatif yang kian menenggelamkan bangsa ini dalam masalah-masalah berkepanjangan yang tidak kunjung usai. Kemiskinan, Ketidakadilan, pelanggaran HAM, korupsi, konflik antar agama, antar suku, dan lainnya telah memperburuk wajah Indonesia di mata dunia dan membuat goresan-goresan kelam di sejarah bangsa ini. Padahal bangsa ini mempunyai Pancasila yang “sakti” yang tidak dapat diubah oleh siapapun, karena luhurnya nilai-nilai yang ia simpan, karena istimewanya.

Bangsa Indonesia harus benar-benar menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, agar Pancasila ini tidak hanya menjadi sekedar nama tanpa rupa. Pancasila adalah hasil karya, ide, dan pemikiran para pejuang kemerdekaan, oleh karena itu marilah kita gali dan amalkan apa yang telah mengantar kita menjadi dasar negara kita, apa yang dihasilkan oleh para pahlawan kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengamalkan apa yang menjadi ide para pahlawannya, bangsa yang mau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita nasionalnya dan cita-cita para pendahulunya.

## **PENINGKATAN KUALITAS BANGSA**

Badri Yatim (1999) menyebut bangsa dalam dua pengertian yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis-antropologis dan bangsa dalam pengertian politik. Dalam pengertian sosiologis-antropologis bangsa adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasasatu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadimereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primodial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas. Satu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya seperti Batak,

Minangkabau, Sunda, Dayak, Banjar, dan sebagainya. Sebuah bangsa juga bisa tersebar di berbagai negara misalnya bangsa Arab yang tersebar diberbagai negara.<sup>24</sup>

Sedangkan Bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam mereka diikat oleh kekuatan politik, yaitu negara. Sehingga bisa dikatakan setelah bernegara maka terciptalah bangsa.<sup>25</sup>

Kualitas suatu bangsa harus dijaga dan selalu ditingkatkan sesuai dengan kepribadian bangsa, begitu pula dengan bangsa Indonesia harus selalu menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Fungsi pendidikan moral biasanya akan lebih difokuskan kepada bagaimana mengembangkan kualitas tertentu yang akan diperlukan masing-masing individu dalam melakukan refleksi atau pilihan.<sup>26</sup> Dalam dunia profesional ,politik, ekonomi, bahkan dalam dunia interaksi sosial, ada tingkah laku yang dikendalikan oleh aturan-aturan tertentu (*ruleguided behavior*) dimana bagian terpenting dari aturan-aturan tersebut erat kaitannya dengan dimensi keadilan dan perhatian. Kewajiban-kewajiban yang pertama umumnya bernuansa negatif, seperti misalnya tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh ataupun tidak boleh mencuri, sementara kewajiban yang kedua umumnya bersifat positif misalnya membantu orang miskin, merawat orang sakit atau membantu mereka yang kesepian. Kedua tipe kewajiban tersebut umumnya telah dimengerti oleh masyarakat dimanapun juga. Banyak kalangan berpendirian, bahwa kita dapat mempercayai orang lain sepanjang orang lain juga mempercayai kita. Umumnya juga sudah diterima suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia sudah pada tempatnya untuk mampu mengadopsi aturan-aturan umum, baik yang berupa kewajiban-kewajiban dalam artian perfect maupun yang imperfect. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa “kebutuhan” memang merupakan salah satu alasan pokok dari perlunya pendidikan moral.<sup>27</sup>

Ketika lokalitas dan globalitas dapat disandingkan untuk saling menguatkan maka nasionalisme harus dibangun sebagai suatu kesadaran bersama, pengalaman bersama, dimana NKRI sebagai negara adalah perahunya, payungnya, panggung kehidupannya. Tanpa kesadran

---

<sup>24</sup> Arif Mansyuri, *Kewarganegaraan* (Surabaya: Kopertis IV Jawa Timur, 2012), 56.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Cheppy Haricahyono, *Dimensi- Dimensi Pendidikan Moral* (Semarang: IKIP Semarang Press.1995), 285.

<sup>27</sup> *Ibid*, 201

demikian, manusia Indonesia tanpa sadar merusak tempat hidupnya sendiri, melubangi perahunya sendiri yang berakibat hilang ditelan hutan, bahkan sampai musnah ditelan arus liar perkembangan zaman.<sup>28</sup>

Peningkatan kualitas Bangsa dalam berbagai bidang yang direaktualisasikan melalui kajian ilmiah di dunia pendidikan maka harus diikuti dengan revitalisasi pada tingkatan normatif ideologis. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai dalam realisasinormatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Dengan demikian reaktualisasi juga meliputi bidang kenegaraan, pemerintahan, kebijakan politik, hukum serta etika politik dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, penulis berasumsi bahwa kualitas suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pendidikan itu berlangsung dan substansi apa yang disampaikan. Secara logika, munculnya tindakan moral tidak bisa dipisahkan dengan argumen-argumen moral. Vlomes dan Joliver (dalam Margono) menegaskan bahwa logika merupakan ilmu berfikir yang tepat dibahas atau dibicarakan jika ada pemikiran dan perkataan dalam bentuk bahasa. Argumentasi moral adalah uraian yang membahas pengembangan moral dengan cara menurut logika yang didukung oleh fakta dan bukti sehingga kekeliruan berpikir dapat dihindari.<sup>29</sup> Sebuah kristalisasi tindakan moral yang diproses melalui pertimbangan moral dengan menggunakan bahan informasi moral Pancasila dan UUD 1945 sebagai etika nasional bangsa indonesia. Kualitas bangsa tersebut digunakan sebagai parameter apakah tindakan moral bangsa Indonesia dapat dibenarkan ataukah ditolak sehingga dengan demikian menggambarkan baik dan buruknya kualitas yang dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Pancasila harus mampu menghadapi pengaruh budaya asing, khususnya ilmu dan teknologi modern dan latar belakang filsafatnya yang berasal dari luar. Prof. Notonagoro telah menemukan cara untuk memanfaatkan pengaruh dari luar tersebut, yaitu secara eklektif mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilosofan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diinkorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Dengan demikian, terhadap pengaruh baru dari luar, maka Pancasila bersifat terbuka dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya, kemudian dijadikan unsur yang serangkaian dan memperkaya struktur filsafat Pancasila. Sepaham dengan Notonagoro, Dibyasuharda mengkualifikasikan Pancasila sebagai struktur

---

<sup>28</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Civic Education Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: PT Gramedia Utama), 77.

<sup>29</sup> Margono dkk. *Pendidikan Pancasila*. (Malang: UM Press, 2002), 8

atau sistem yang terbuka dinamik, yang dapat menggarap apa yang datang dari luar, dalam arti luas, menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya, malah mempunyai daya ke luar, mempengaruhi dan mengkreasi.<sup>30</sup>

Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila ada daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya di masa mendatang. Sedangkan penerapan atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya luar tersebut berdasar pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan pengembangan ideologi, bukan hanya Pancasila yang menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, namun nilai-nilai Pancasila bisa ditawarkan dan berpengaruh, serta menyokong kepada kebudayaan atau ideologi lain. Bahkan Soerjanto Poespowardojo menjelaskan, bahwa dinamika yang ada pada aktualisasi Pancasila memungkinkan bahwa Pancasila juga tampil sebagai alternatif untuk melandasi tata kehidupan internasional, baik untuk memberikan orientasi kepada negara-negara berkembang pada khususnya, maupun mewarnai pola komunikasi antar negara pada umumnya.<sup>31</sup>

Ideologi Pancasila bukanlah pseudo religi. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijabarkan secara rasional dan kritis agar membuka iklim hidup yang bebas dan rasional pula. Konsekuensinya, bahwa Pancasila harus bersifat terbuka. Artinya, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar. Dengan begitu ideologi Pancasila akan menunjukkan sifatnya yang dinamik, yaitu memiliki kesediaan untuk mengadakan pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi manusia dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik. Kreativitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyeleksi nilai-nilai baru dan mencari alternatif bagi pemecahan masalah-masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ideologi Pancasila tidak a priori menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai yang dipertimbangkan dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat

---

<sup>30</sup> Dibyasuharda. *Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol* (Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.1990), 229.

<sup>31</sup> Soerjanto Poespowardojo. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia.1989), 14.

kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Hardono Hadi, bangsa Indonesia, sebagai pengemban ideologi Pancasila, tidak defensif dan tertutup sehingga sesuatu yang berbau asing harus ditangkal dan dihindari karena dianggap bersifat negatif. Sebaliknya tidak diharapkan bahwa bangsa Indonesia menjadi begitu amorf, sehingga segala sesuatu yang menimpa dirinya diterima secara buta tanpa pedoman untuk menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diintegrasikan dalam pengembangan dirinya.<sup>32</sup>

Bangsa Indonesia mau tidak mau harus terlibat dalam dialog dengan bangsa-bangsa lain, namun tidak tenggelam dan hilang di dalamnya. Proses akulturasi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia juga dituntut berperan aktif dalam pergaulan dunia. Bangsa Indonesia harus mampu ikut bermain dalam interaksi mondial dalam menentukan arah kehidupan manusia seluruhnya. Untuk bisa menjalankan peran itu, bangsa Indonesia sendiri harus mempunyai kesatuan nilai yang menjadi keunikan bangsa, sehingga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam percaturan internasional. Identitas diri bukan sesuatu yang tertutup tetapi sesuatu yang terus dibentuk dalam interaksi dengan kelompok masyarakat bangsa, negara, manusia, sistem masyarakat dunia.<sup>33</sup> Semuanya itu mengharuskan adanya strategi kebudayaan yang mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi basis atau bahan utama dari pendidikan moral dan pendidikan karakter yang merupakan alat untuk membentuk keperibadian luhur, karakter, dan moral bangsa Indonesia. Dua jenis metode pendidikan tersebut akan saling bekerja sama, melebur menjadi satu, karena pada dasarnya keduanya dirancang untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda. Pendidikan moral dan karakter selanjutnya harus diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional karena akan lebih mudah untuk diawasi kualitasnya oleh Pemerintah. Selanjutnya harus dibuat satu mata pelajaran khusus yang materinya adalah tentang bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap Pancasila dan makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kemudian dilatih bagaimana cara pengaplikasiannya di kehidupan nyata; ini merupakan kegiatan praktek yang harus dilakukan siswa atau peserta didik. Kegiatannya pun bisa dimodifikasi sedemikian

---

<sup>32</sup> Hardono Hadi, P., *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius.1994), 57.

<sup>33</sup> Sastrapratedja, M., *Pancasila dan Globalisasi* (Magelang: Panitia Seminar Nasional Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996), 3.

rupa oleh guru atau pendidik contohnya kerja bakti bersama masyarakat desa, *games* atau permainan unik sehingga peserta didik dapat mengerti pesan-pesan moral apa yang didapat dari kegiatan tersebut.

Pada akhirnya yang paling penting adalah mengimplementasikan dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Disini terlihat bahwa tugas bangsa Indonesia sangatlah tidak mudah, bahkan berat. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain selain berjuang dengan keras dan terus-menerus tiada henti, sebab reaktualisasi Pancasila demi meningkatkan kualitas moral bangsa Indonesia pada masa ini bukan persoalan yang mudah, hal ini disebabkan disamping semangat dan kondisi sosial politik negara dan bangsa Indonesia yang sangat memperhatikan, juga adanya tekanan yang terus-menerus berorientasi untuk mengotori moral Bangsa Indonesia.

Dengan demikian, aktualisasi pendidikan Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia adalah sebuah konsekuensi logis guna semakin terciptanya sumber daya manusia yang cerdas holistik sebagaimana tertera dalam tujuan pendidikan nasional dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

## **PENUTUP**

Bangsa Indonesia harus berupaya menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarayang sesuai dengan nilai-nilai filosofi Bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Terwujudnya bangsa Indonesia yang mempunyai kualitas digambarkan oleh baik dan buruknya segala hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sejalan dengan tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan oleh sebab itu disaat ingin menjadi bangsa yang berkualitas maka hendaknya lebih memperhatikan pendidikan moral baik melalui pendidikan formal, informal, dan non formal.

Globalisasi memang tidak bisa dihindari, tetapi bangsa Indonesia harus berbuat, harus menetapkan tekad untuk membangun kemandirian dan peningkatan kualitas moral dengan semangat modernisasi di era global dan tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arif Mansyuri. *Kewarganegaraan*. Surabaya: Kopertis IV Jawa Timur, 2012
- Asri Budiningsih. *Pembelajaran Moral: Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya..* Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Cheppy Haricahyono. *Dimensi- Dimensi Pendidikan Moral*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995
- Dibyasuharda. 1990. *Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol*. Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.
- Hardono Hadi, P. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1994
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Civic Education Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Kaelan. *Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar filsafat dan ideologi Bangsa dan negara Indonesia*. Jogjakarta: Universitas Gajahmada, 2006.
- Kaelan. Pendidikan keawarganegaraan. (Jogjakarta: Universitas Gajahmada, 2010)
- Likumahua. *Sastra Suatu Sarana Pendidikan Informal*. Salatiga: Widya Sari Press Salatiga, 2001
- Moerdino. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Baba*, dalam Majalah **Mimbar** No.75 tahun XIII. 1995)
- Margono dkk. *Pendidikan Pancasila*. Malang: UM Press, 2002
- M Noor Syam, *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)*, edisi II, (Malang: Laboratorium Pancasila. 2000
- Sastrapatedja, M. *Pancasila dan Globalisasi*. Magelang: Panitia Seminar Nasional Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996.
- Soko Wiyono. *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2011

- Soedjati Djiwandono, J.. *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan*. Jakarta: CSIS.1995
- Soerjanto Poespowardojo. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia.1989
- Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.1993
- Umar Tirtaraharja dan Sulo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- UU No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan nasional
- Elly Retnaningrum dalam ([http://educare.e-fkipunla.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=12&Itemid=18](http://educare.e-fkipunla.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18), di akses tanggal 4 Maret 2010).
- Erlin Slamet dalam (<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-indonesia/article/view/23> SKRIPSI Jurusan Sastra Indonesia-Fakultas Sastra UM, 2006, di akses tanggal 4 Maret 2010)